BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang :

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024, maka Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 telah mengalami perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3.Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 84 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2019-2024.**

Pasal I…

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019- 2024 (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 0594) diubah sehingga menjadi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal 29 November 2021
BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING – BULLU

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 29 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021 NOMOR 054

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing						
1	**Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia**	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Dinas PKO Kab. Rote Ndao	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Dinas PKO Kab. Rote Ndao dan BPS Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas	Dinas PKO Kab. Rote Ndao	Dinas PKO Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kasus Kematian Ibu	Kasus	Jumlah kasus kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao	Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao
		Prevalensi Stunting	%	Jumlah balita stunting / Jumlah Balita yang diukur x 100		
	Meningkatnya Pengarus-utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	Indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki	Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao	Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao dan BPS Kab. Rote Ndao
		Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Orang	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao	Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Pengendalian Jumlah Penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk (%)	%	Angka yang menunjukan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu	Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao	Dinas P3AP2KB, Disdukcapil dan BPS Kab. Rote Ndao
Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kontribusi Sektor Pariwisata Yang Didukung oleh Pertanian dan Perikanan						
2	**Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing**	PDRB Per Kapita ADHB	Rp	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu Atas Dasar Harga Berlaku	Seluruh Perangkat Daerah	Bapelitbang dan BPS Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta kesejahteraan sosial masyarakat	Kemiskinan ekstrim	%	Kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem - setara dengan USD 1.9 PPP (purchasing power parity)	Seluruh Perangkat Daerah	Dinas Sosial Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB	%	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan /Jumlah PDRB x 100	Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao	Dinas Koperindag dan BPS Kab. Rote Ndao
3	**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata, Pertanian dan Perikanan**	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Miliar Rupiah	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian Kehutanan dan Perikanan	Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao	Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao, BPS Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Jumlah produksi sektor pertanian	Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao	Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah	Jumlah Kunjungan Wisata	Orang	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Disbudpar Kab. Rote Ndao	Disbudpar Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	Persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) x Bobot Masing-Masing Kelompok Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Rote Ndao	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan						
4	**Meningkatnya konektivitas, ketersediaan sumber daya air dan permukiman yang layak**	Cakupan kualitas infrastruktur	%	Kumulatif dari Pembangunan Jalan (20%), Irigasi (20%), Permukiman (20%), Sanitasi (20%) dan Air Bersih (20%)	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao Dinas PUPR Kab. Rote Ndao	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao Dinas PUPR Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya konektivitas	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik / Total Panjang Jalan Kabupaten x 100	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan Sumber Daya Air	Rasio Jaringan Irigasi	%	Panjang saluran irigasi / Luas Lahan Budidaya Pertanian x 100	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao	Dinas PUPR dan Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Dinas PMD Kab. Rote Ndao	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Dinas PMD Kab. Rote Ndao
5	**Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan**	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	Tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	%	Jumlah sampah yang tertangani (ton) / Total jumlah timbulan sampah di Kabupaten (ton) x 100	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao
		Emisi Gas Rumah Kaca	tCO2eq	Jumlah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao	Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	Realisasi RTRW/Rencana Peruntukan x 100	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao	Dinas PUPR Kab. Rote Ndao

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Desa Tangguh Bencana	Desa	Jumlah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dalam menghadapi potensi ancaman bencana (diberdayakan dan/ memiliki relawan bencana)	BPBD Kab. Rote Ndao, Dinas PMD Kab. Rote Ndao	BPBD Kab. Rote Ndao
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima						
6	**Meningkatnya akuntabilitas, kinerja transparansi dan responsibilitas pelayanan publik**	Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	Predikat	Penilaian yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB	Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao	Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao
		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB	Inspektorat Kab. Rote Ndao	Inspektorat Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BKA Kab. Rote Ndao	BKA Kab. Rote Ndao
	Meningkatnya transparansi dan responsibilitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Poin	Rata-rata Skor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Pelayanan Publik Yang Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas Dukcapil Kab. Rote Ndao, Dinas PMPTSP, Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao	Bagian Organisasi Setda Kab. Rote Ndao

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU

LAMIPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : 54 TAHUN 2021
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN ROTE NDAO

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	Jumlah siswa PAUD usia 5-6 tahun/Total jumlah anak usia 5-6 tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka Partisipasi Kasar	%	Jumlah murid SD atau Sederajat dan SMP atau Sederajat / Jumlah penduduk usia 7-15 tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka partisipasi murni	%	Rata-rata Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A dan Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/ Paket A	%	Jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI/Paket A / Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	%	Jumlah siswa usia 13-15 Tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B / Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 Tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	Jumlah siswa SD dan SMP usia 7-15 tahun/Total jumlah penduduk usia 7-15 tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	Jumlah siswa Pendidikan Kesetaraan usia 7-18 tahun/Total jumlah penduduk usia 7-18 tahun x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka putus sekolah	Orang	Jumlah Angka putus sekolah (APS) SD/ MI dan SMP/ MTs	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Angka putus sekolah (APS) SD/ MI	Orang	Jumlah Angka putus sekolah (APS) SD/ MI	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs	Orang	Jumlah Angka putus sekolah (APS) SMP/ MTs	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SD/MI x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MT kondisi bangunan baik / Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	Jumlah sekolah (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) thn x 10.000	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (/10.000)	%	Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) / Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar	%	Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas / Jumlah murid pendidikan dasar x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	Jumlah Capaian Kinerja Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf se-Kabupaten dan Kota / Jumlah Seluruh Penduduk yang berusia > 15 tahun Melek Huruf se-Kabupaten dan Kota x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Kompetensi Guru	%	Jumlah Guru TK, SD, dan SMP yang memiliki sertifikat kompetensi / Jumlah Guru TK, SD dan SMP x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV / Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
	Meningkatnya SDM kepemudaan dan Olah Raga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	Jumlah organisasi pemuda yang aktif / Jumlah seluruh organisasi pemuda x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
		Cakupan pembinaan atlet muda	%	Jumlah atlit pelajar yang dibina / Jumlah seluruh atlit pelajar x 100	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
2	**DINAS KESEHATAN**					
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Balita Gizi Buruk	%	Prevalensi Balita Gizi buruk adalah Persentase Balita Gizi Buruk yang dihitung berdasarkan indeks berat badan menurut umur (BB/U) yang berada pada score <-3SD tabel baku WHO, diukur pada kurun waktu tertentu.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Kasus Kematian Bayi	Kasus	Jumlah kematian bayi adalah jumlah kasus kematian yang terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) pada kurun waktu tertentu.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Balita Gizi Kurang	%	Jumlah Balita Giz Kurang / Jumlah Balita ditimbang x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah kematian balita	Kasus	Jumlah Kematian Balita adalah Jumlah kematian anak berusia 0 - 4 tahun (0-59 bulan) selama satu tahun tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Jumlah kematian neonatal	Kasus	Jumlah Kematian Neonatal adalah Jumlah kematian anak berusia 0 - 29 hari selama satu tahun tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 100.000 Penduduk	Rasio tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) per jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada kurun waktu yang sama	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Rasio daya tampung Rumah Sakit / Jumlah penduduk	Per 1.000 Penduduk	Rasio Daya Tampung RS adalah Perbandingan Jumlah Tempat Tidur Perawatan terhadap 1000 penduduk dalam suatu wilayah dan satuan waktu tertentu	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Impelentasi KTR pada 9 tempat (Pendidikan, Kesehatan, Transportasi, dll)	Tempat	Jumlah tempat yang mengimplemantasi KTR	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan RT ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	Jumlah Rumah Tangga yang ber PHBS / Total Rumah Tangga yang disurvei x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan desa/kelurahan *universal child immunization (UCI)*	%	Jumlah Desa UCI / Jumlah Total Desa x 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Tingkat kematian karena tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) / Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama x 100.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (per 1.000 penduduk)	Per 1.000 Penduduk	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu / Jumlah penduduk disatu wiayah kerja pada kurun waktu yang sama x 1000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
	Meningkatknya pelayanan jalan dalam kondisi mantap	Panjang Jalan Kabupaten terbangun	Km	Panjang jalan Kabupaten terbangun tahun n-1 ditambah tahun n	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Jalan Strategis Desa Terbangun	Km	Panjang jalan strategis Desa terbangun tahun n-1 ditambah tahun n	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya layanan Daerah Irigasi dalam kondisi mantap	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Luas irigasi kabupaten x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pembangunan dan rehabilitasi embung, bendung/bangunan air lainnya	unit	Jumlah Pembangunan dan rehabilitasi Embung, Bendung yang terbangun tahun n-1 ditambah tahun n	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	Jumlah Rumah Tangga yang berakses air bersih/Total Rumah Tangga x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	Jumlah Rumah Tangga yang bersanitasi layak/Total Rumah Tangga x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Tempat Pemakaman Umum yang tertata	Lokasi	Jumlah Tempat Pemakaman Umum yang tertata	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya konsistensi pemanfaatan ruang untuk pembangunan sesuai kaidah ruang yang dinamis, produktif dan ramah lingkungan melalui pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang efektif	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah/kawasan perkotaan	%	Luasan RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM / Luasan RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Rasio Bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	Jumlah bangunan ber – IMB / Jumlah bangunan x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kesesuaian antara perencanaan peruntukan ruang dan pemanfaatan ruang	%	Jumlah pelaksanaan program sesuai perencanaan ruang / jumlah total program x 100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**					
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Luas lahan bersertifikat	Hektar	Lahan Pemda Bersertifikat	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Realisasi luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Ha	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan kepentingan lainnya	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Terjaganya kualitas lingkungan sesuai standar baku mutu lingkungan	Indeks kualitas Air	Poin	Survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**					
	Menurunnya angka gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Rote Ndao	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	%	100 orang petugas Linmas di Kabupaten / 1 Wilayah kerja kabupaten x 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	Pelanggaran K3 yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP x 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penegakan PERDA	%	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA / Jumlah pelanggaran PERDA x 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya Penanganan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota	%	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran / Luas wilayah kabupaten x 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tingkat waktu tanggap *(respons time rate*) daerah layanan wilayah manajamen kebakaran (WMK)	%	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit / Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK x 100	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja
6	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**					
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen dan Penanganan Bencana	Persentase penanganan pra bencana	%	Jumlah penanganan pra bencana / Jumlah Total penanganan pra bencana yang direncanakan x 100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	Jumlah penanganan tanggap darurat bencana / Jumlah Bencana x 100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan pasca bencana	%	Jumlah penanganan pasca bencana / Jumlah Total penanganan pasca bencana yang direncanakan x 100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	**DINAS SOSIAL**					
	Meningkatnya Pelayanan dan pemberdayaan PMKS dalam penanganan fakir miskin	Persentase PMKS yang tertangani	%	Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS yang ada x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase keluarga fakir miskin yang diberdayakan	%	Jumlah fakir miskin yang diberdayakan / Total jumlah fakir miskin x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Cakupan peserta JKN/Jamkesda	Jiwa	Jumlah total peserta JKN/Jamkesda	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase Keluarga penerima manfaat yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)	%	Jumlah KPM yang mendapat PKH / Jumlah Total KPM x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	Jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitas sosial diluar panti / Jumlah total penyandang disabilitas x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti / Jumlah anak terlantar x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	Jumlah lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti / jumlah lanjut usia terlantar x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	Jumlah gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti / Jumlah gelandangan dan pengemis x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%	Jumlah korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial / Jumlah korban bencana x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
		Persentase desa yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	%	Jumlah desa yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS / Jumlah Desa x 100	Dinas Sosial	Dinas Sosial
8	**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**					
	Meningkatnya ketrampilan kompetensi tenaga kerja dan produktifitas tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	Persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Orang	Jumlah Tenaga yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun-1 ditambah tahun n	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Orang	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat pada tahun-1 ditambah tahun n	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Besaran Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Orang	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada tahun-1 ditambah tahun n	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Perusahaan	Jumlah Pemeriksaan terhadap Perusahaan pada tahun-1 ditambah tahun n	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Meningkatnya taraf hidup transmigran	Persentase transmigran lokal	%	Jumlah transmigran lokal/Jumlah transmigran x 100	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9	**DINAS PEMBEDERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB**					
	Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah / Jumlah pekerja perempuan x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan / Jumlah angkatan kerja perempuan x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	Jumlah KDRT / Jumlah rumah tangga x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu / Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu	%	Jumlah korban kekerasan yang memperolah pelayanan rehabsos / Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum / Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan layanan pemulangan bagi anak perempuan dan anak korban kekerasan	%	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulungan / Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan KB, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka kelahiran	*Total fertility rate* (TFR)		Angka Kelahiran Total	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	%	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB / Jumlah semua perangkat daerah x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	Jumlah perangkat daerah yang menyusun & memanfaatkan Rancangan Induk pengendalian penduduk / Jumlah semua perangkat daerah x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Perkada) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	Perda/ Perkada	Jumlah Perda atau Perkada tentang Pengendalian Penduduk	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	%	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan / Total sektor x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja sama	Jumlah kerja sama pendidikan kependudukan	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Rasio akseptor KB	%	Jumlah Akseptor KB / Jumlah pasangan usia subur x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah 15-49	%	Jumlah peserta KB aktif / Jumlah pasangan usia subur x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 / Jumlah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 pada pertengahan tahun yang sama x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	%	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th / Jumlah pasangan usia subur x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah pasangan usia subur x 100	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
		Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa atau kelurahan	Dinas P3AP2KB	Dinas P3AP2KB
10	**DINAS KETAHANAN PANGAN**					
	Meningkatnya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan utama	%	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg)/Jumlah penduduk x 100	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Penanganan daerah rawan pangan	Desa	Jumlah Daerah rawan pangan yang ditangani	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
11	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP / Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	Jumlah anak 0-17 tahun berakte kelahiran / Jumlah anak 0-17 tahun x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Rasio pasangan berakte nikah	%	Jumlah pasangan nikah berakte nikah / Jumlah keseluruhan pasangan nikah x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Penerapan KTP nasional berbasis NIK	%	Jumlah KTP yang diterbitkan / Jumlah KTP ber-NIK x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan / Jumlah penduduk wajib KTP x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan / Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan x 100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Jumlah Desa Maju	Desa	Jumlah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan pada tahun n-1 ditambah tahun n	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif	%	Jumlah PKK Aktif / Jumlah PKK x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Posyandu aktif	%	Jumlah Posyandu Aktif / Jumlah Posyandu x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa Siaga Aktif	%	Jumlah desa siaga aktif /Jumlah desa siaga yang dibentuk x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Realisasi APBDes	%	Realisasi APBDes / Total APBDes x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Bumdes Berkembang	%	Jumlah Bumdes Berkembang/Total Bumdes x 100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
13	**DINAS PERHUBUNGAN**					
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah uji KIR angkutan umum	Kendaran	Jumlah Uji KIR bagi angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada tahun n-1 ditambah tahun n	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan pada ruas jalan kabupaten	%	Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang terpasang/Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang direncanakan x 100	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
14	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN**					
	Meningkatnya pelayanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	Evaluasi tingkat kematangan Pelaksanaan SPBE (Permenpan no. 5/2018)	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah	%	Jumlah PPID/ Total PPID yang direncanakan x 100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Layanan administrasi Pemerintah (G2G) yang diimplementasikan	%	Jumlah layanan G2G/Jumlah Total unsur G2G x 100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Tersedianya sistem data dan statisik yang terintegrasi (Rote Satu Data)	Belum Tersedia/Tersedia	Sistem data dan statisik yang terintegrasi dalam aplikasi Rote Satu Data	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Jumlah aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	Jumlah Aplikasi yang diamankan / Keseluruhan aplikasi yang digunakan oleh Pemda x 100	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**					
	Meningkatnya peran koperasi UMKM, industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian	Persentase koperasi aktif	%	Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Jumlah UMKM	%	Jumlah UMKM Aktif / Jumlah seluruh UMKM x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	Jumlah kelompok pedagang atau usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n / Jumlah kelompok pedagang atau usaha informal x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Cakupan bina kelompok pengrajin	%	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapat bantuan binaan pemda tahun n/Jumlah kelompok pengrajin x 100	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Produksi Oleh-Oleh Dari Rote (OODARO)	Rupiah	Jumlah nilai Produksi Oleh-Oleh Dari Rote (OODARO)	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
16	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**					
	Meningkatnya investasi	Meningkatnya Investasi berskala nasional	PMDN/ PMA	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Realisasi Investasi PMDN/PMA	Rupiah	Jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya pelayanan perijinan	Persentase Bangunan/Usaha Berijin	%	Realisasi bangunan / usaha berijin / Target bangunan / usaha berijin x 100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**					
	Meningkatnya peran budaya dan pariwisata dalam perekonomian daerah	Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata	kegiatan	Jumlah penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata pada tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	situs	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan pada tahun n-1 di tambah tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Meningkatnya Cagar Budaya yang di inventarisasi	unit	Jumlah Cagar Budaya yang di inventarisasi pada tahun n-1 di tambah tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Destinasi wisata yang dikembangkan	Destinasi	Jumlah destinasi pariwisata yang dibangun, direhab dan dipromosikan pada tahun n-1 di tambah tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Desa Wisata	Desa	Jumlah desa wisata pada tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Jumlah Usaha Pariwisata ber-CHSE	Usaha	Jumlah Usaha Pariwisata ber- CHSE pada tahun n-1 di tambah tahun n	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
18	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**					
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perpustakaan Daerah	Meningkatnya pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun n	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun n-1 ditambah tahun n	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Meningkatnya koleksi judul buku perpustakaan	Buku	Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun n-1 ditambah tahun n	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Meningkatnya Pengelolaan Kearsipan Daerah	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan arsip secara baku / Jumlah Perangkat Daerah x 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	**DINAS PERIKANAN**					
	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan	Produksi Kelautan dan Perikanan	Ton	Jumlah produksi kelautan dan perikanan	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
	Meningkatnya produksi kelautan dan perikanan	Produksi perikanan Tangkap	Ton	Jumlah produksi perikanan tangkap	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		Produksi budidaya rumput laut	Ton	Jumlah produksi rumput laut	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	Ton	Jumlah produksi perikanan budidaya air tawar	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		Konsumsi ikan	Kg/kapita	Total Konsumsi Ikan / Jumlah Penduduk	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
		Cakupan bina kelompok nelayan	%	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemda Tahun n / Total kelompok nelayan x 100	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
20	**DINAS PERTANIAN**					
	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan	Nilai Tukar Petani	Poin	Perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib)	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian	Cakupan bina kelompok petani	%	Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan Pemda tahun n / jumlah kelompok petani yang direncanakan x 100	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produktivitas padi	Ton/Ha	Produksi tanaman padi (Ton) / Luas areal tanaman padi (Ha)	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Produksi Padi	Ton	Jumlah produksi padi	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi Jagung	Ton	Jumlah produksi jagung	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi Sayur-Sayuran	Ton	Jumlah produksi sayur-sayuran	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi Buah-Buahan	Ton	Jumlah produksi buah-buahan	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
		Produksi lontar	Ton	Jumlah produksi lontar	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
21	**DINAS PETERNAKAN**					
	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan dan perikanan	Produksi Peternakan	Ekor	Jumlah Produksi Peternakan	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
	Meningkatnya Produksi Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Besar	Ekor	Jumlah Ternak Besar	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
		Jumlah Populasi Ternak Kecil	Ekor	Jumlah Ternak Kecil	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
		Jumlah Populasi Ternak Unggas	Ekor	Jumlah Ternak Unggas	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan
22	**BAGIAN UMUM**					
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan standar keprotokolan	%	Jumlah Kegiatan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Derah yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan standar Keprotokolan/jumlah kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah x 100	Bagian Umum	Bagian Umum
23	**BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Kualitatif (ST/T/S/R)	Hasil penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Bagian Adminisrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Adminisrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Cakupan kegiatan fasilitasi pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan umat beragama	%	Jumlah kegiatan fasilitasi pembinaan/peningkatan kualitas kehidupan umat beragama yang dilaksanakan/Jumlah kegiatan yang direncanakan x 100	Bagian Adminisrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Adminisrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Persentase penerima beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu	%	Jumlah penerima beasiswa/Jumlah yang direncanakan x 100	Bagian Adminisrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Bagian Adminisrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
24	**BAGIAN HUKUM**					
	Meningkatnya kualitas dan publikasi peraturan perundang-undangan daerah	Persentase Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat	%	Jumlah Peraturan Daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat/Jumlah seluruh Perangkat yang tercantum dalam program legislasi daerah x 100	Bagian Hukum	Bagian Hukum
		Persentase publikasi peraturan perundang-undangan daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	%	Jumlah Peraturan perundang-undangan Daerah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah/Jumlah seluruh Peraturan Perundang-undangan daerah x 100	Bagian Hukum	Bagian Hukum
25	**BAGIAN ORGANISASI**					
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LAKIP tepat waktu	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan LAKIP tepat waktu/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
	Meningkatnya Transparansi dan Responsibilitas Pelayanan Publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki SOP/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan Anjab	%	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan Anjab/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Persentase PD yang memiliki SOTK	%	Jumlah Perangkat Daerah Yang Memiliki SOTK/ Jumlah Perangkat Daerah x 100	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Indeks kepuasan pelayanan publik Perangkat Daerah	Poin	Rata-rata skor nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
26	**BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**					
	Meningkatnya Pelayanan bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	%	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan realisasi fisik keuangan/Jumlah seluruh Perangkat Daerah x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian Administrasi Pembangunan
		Persentase BUMD yang sehat	%	Jumlah BUMD yang sehat/Jumlah total BUMD x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Ketersediaan Data Potensi Sumber Daya Alam	%	Jumlah PD yang menyampaikan data potensi sumber daya alam/Jumlah perangkat daerah penyedia data x 100	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
27	**BAGIAN ADMINISTRASI LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**					
	Meningkatnya layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase fasilitasi pangadaan barang/jasa	%	Total belanja e-procurement/Total belanja pengadaan dalam APBD x 100	Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
28	**SEKRETARIAT DPRD**					
	Meningkatnya kualitas pelayanan Lembaga DPRD dalam rangka mendukung tugas, fungsi dan wewenang	Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan	Perda	Jumlah peraturan daerah yang ditetapkan pada tahun n-1 ditambah tahun n	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan	Keputusan DPRD	Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan pada tahun n-1 ditambah tahun n	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	Ranperda	Jumlah rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan pada tahun n-1 ditambah tahun n	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kab.Rote Ndao	Ada	Ada / Tidak Ada	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada	Ada / Tidak Ada	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD
		Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada / Tidak Ada	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
29	**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati	%	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Target dokumen perencanaan yang disusun x 100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	Jumlah Program RKPD tahun berkenan/ Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan x 100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	Jumlah Program APBD tahun berkenan/ Jumlah program RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenan x 100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Jumlah dokumen perencanaan kawasan perbatasan	Dokumen	Jumlah Rencana Aksi daerah Pengelolaan Perbatasan yang disusun di tahun n-1 ditambah tahun n	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	Penerapan kelitbangan untuk pembangunan daerah	Jumlah kelitbangan yang dilaksanakan	Jenis	Jumlah penelitian, pengembangan, pengkajian yang dilaksanakan di tahun n-1 ditambah tahun n	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi / Jumlah total perangkat daerah x 100	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
30	**BADAN KEUANGAN DAN ASET**					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Persentase SILPA terhadap APBD	%	Total Silpa / Total APBD x 100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Penetapan APBD	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Ketepatan Waktu Penetapan APBD	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Pengelolaan Aset Daerah	%	Aset yang ditangani / Total aset x 100	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
31	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah	Presentase PAD terhadap pendapatan	%	Total PAD/Total Pendapatan x 100	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Presentase Realisasi PAD	%	Realisasi PAD/Target PAD x 100	Badan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
32	**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan kepegawaian	Meningkatnya Jabatan pimpinan tinggi yang terisi pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah jabatan pimpinan tinggi yang terisi pada instansi pemerintah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah pada tahun n-1 ditambah tahun n	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Persentase kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN	%	Jumlah ASN yang dikenai sanksi / Jumlah total ASN x 100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
	Meningkatnya kompetensi aparatur sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan	Meningkatnya ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun n-1 ditambah tahun n	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Orang	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun n-1 ditambah tahun n	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
33	**SEKRETARIAT KORPRI**					
	Membangun solidaritas dan soliditas pegawai	Persentase ASN yang mengikuti lomba dalam rangka HUT KORPRI	%	Jumlah aparatur yang mengikuti lomba/Jumlah aparatur pendaftar lomba x 100	Sekretariat KORPRI	Sekretariat KORPRI
		Persentase ASN yang mengikuti Pekan Olah Raga Seni dan Budaya (PORSENI) KORPRI	%	Jumlah aparatur yang mengikuti PORSENI/Jumlah aparatur pendaftar lomba x 100	Sekretariat KORPRI	Sekretariat KORPRI
	Mewujudkan organisasi yang kuat berwibawa bagi anggota KORPRI	Penyelenggaraan Rapat Kerja Musyawarah Kabupaten	%	Jumlah aparatur yang mengikuti Rapat Kerja Musyawarah Kabupaten/Jumlah aparatur yang diundang x 100	Sekretariat KORPRI	Sekretariat KORPRI

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
34	**INSPEKTORAT DAERAH**					
	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintah daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan x 100	Inspektorat	Inspektorat
		Jumlah Temuan BPK	Temuan	Jumlah temuan hasil pemeriksaan	Inspektorat	Inspektorat
35	**KECAMATAN LOBALAIN**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x100	Kecamatan Lobalain	Kecamatan Lobalain
36	**KECAMATAN ROTE BARAT LAUT**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Rote Barat Laut	Kecamatan Rote Barat Laut

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
37	**KECAMATAN ROTE BARAT DAYA**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Rote Barat Daya	Kecamatan Rote Barat Daya
38	**KECAMATAN ROTE BARAT**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Rote Barat	Kecamatan Rote Barat
39	**KECAMATAN ROTE SELATAN**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Rote Selatan	Kecamatan Rote Selatan

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
40	**KECAMATAN ROTE TENGAH**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Rote Tengah	Kecamatan Rote Tengah
41	**KECAMATAN PANTAI BARU**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Pantai Baru	Kecamatan Pantai Baru
42	**KECAMATAN ROTE TIMUR**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Rote Timur	Kecamatan Rote Timur

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
43	**KECAMATAN NDAO NUSE**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Ndao Nuse	Kecamatan Ndao Nuse
44	**KECAMATAN LANDULEKO**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Landu Leko	Kecamatan Landu Leko
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Landu Leko	Kecamatan Landu Leko
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan LanduLeko	Kecamatan Landu Leko
45	**KECAMATAN LOAHOLU**					
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat / Jumlah pengaduan masyarakat x 100	Kecamatan Loaholu	Kecamatan Loaholu
		Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	%	Jumlah layanan pengaduan pada bangunan liar dan bangunan tidak berijin pada jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten / Jumlah total bangunan liar dan tidak berijin x 100	Kecamatan Loaholu	Kecamatan Loaholu
		Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan	%	Jumlah PKK yang mendapat pembinaan / Jumlah PKK yang direncanakan x 100	Kecamatan Loaholu	Kecamatan Loaholu
46	**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					
	Terwujudnya pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini	Cakupan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan	%	Jumlah kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan / jumlah pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang direncanakan x 100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	Jumlah ormas/LSM yang dibina / jumlah ormas/LSM x 100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
		Persentase partai politik yang diverifikasi	%	Jumlah kegiatan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang dilaksanakan / jumlah pembinaan ideologi wawasan kebangsaan yang direncanakan x 100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
		Cakupan pembinaan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi	%	Jumlah kegiatan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang dilaksanakan / Jumlah seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang direncanakan x 100	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

BUPATI ROTE NDAO,

PAULINA HANING - BULLU